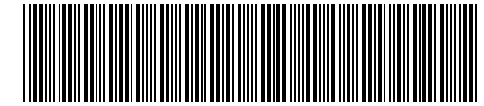




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408757/2021**



DS:7045-0405-0362-0145

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI            |
| 2. Unit Organisasi            | : (08)     | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                   |
| 3. Provinsi                   | : (05)     | JAWA TIMUR  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408757) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA             |
| Sebesar                       | : Rp.      | 233.000.000 ( DUA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi  
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	233.000.000
Rp.	233.000.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	233.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN SURABAYA II | (135) Rp. | 233.000.000 |
|---------------------|-----------|-------------|

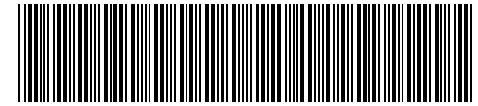
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7045-0405-0362-0145

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (408757) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			233.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			233.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	22,00	Rekomendasi Kebijakan	204.320.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	22,00	Rekomendasi Kebijakan	204.320.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	27,00	Orang	28.680.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	27,00	Orang	28.680.000

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

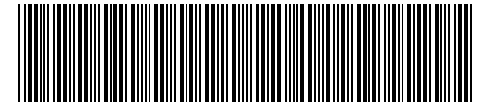
ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2021**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7045-0405-0362-0145

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
 Kode>Nama Satker : (408757) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	233.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	233.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7045-0405-0362-0145

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (408757) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408757	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	-	233.000	-	-	-	233.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	233.000	-	-	-	233.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	233.000	-	-	-	233.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	204.320	-	-	-	204.320	05 . 51	
01	RM	-	204.320	-	-	-	204.320	135	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	28.680	-	-	-	28.680	05 . 51	
01	RM	-	28.680	-	-	-	28.680	135	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>233.000</b>	-	-	-	<b>233.000</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7045-0405-0362-0145

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (408757) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

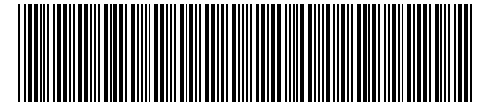
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408757	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.650	10.575	39.670	13.515	21.425	17.495	23.095	25.200	15.470	35.835	19.725	9.345	233.000
		<b>BELANJA BARANG</b>	1.650	10.575	39.670	13.515	21.425	17.495	23.095	25.200	15.470	35.835	19.725	9.345	233.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	1.650	10.575	39.670	13.515	21.425	17.495	23.095	25.200	15.470	35.835	19.725	9.345	233.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.650	10.575	39.670	13.515	21.425	17.495	23.095	25.200	15.470	35.835	19.725	9.345	233.000

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:7045-0405-0362-0145

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [05] JAWA TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [408757] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2021  
IV B. C A T A T A N**



DS:7045-0405-0362-0145

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [05] JAWA TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [408757] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001